



LAPORAN LAKIP

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2022



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 telah tersusun sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas secara periodik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap unit kerja, satuan kerja dan kementerian/Lembaga sebagai entitas akuntabilitas untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitasnya secara berjenjang dan periodik. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi internal.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja ini memberikan gambaran capaian Kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Dengan demikian diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan feedback bagi internal organisasi Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit/satuan kerja dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos
NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197505131993112001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS TENAGA KERJA

Jl. Raya Jati No. 4 Sidoarjo

Telepon. 0318946664

Email : disnaker@sidoarjokab.go.id Website : disnaker.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos
NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197505131993112001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022. Laporan ini memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, selain itu juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan sekaligus sebagai bentuk evaluasi diri terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Tenaga Kerja dan pada Dinas Tenaga tahun anggaran 2022 serta peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Tenaga Kerja senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan urusan Tenaga Kerja tersebut sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja yang memiliki tujuan utama yaitu Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan, yang memiliki empat sasaran, yaitu Angkatan Kerja Terlatih yang telah bekerja, Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial, dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja yang masing-masing memiliki indikator dan target yang harus dicapai pada tahun 2022 ini yaitu pada indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 10,39%. Sedangkan pada indikator sasaran pertama yaitu Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dengan target 57%, indikator kedua Persentase Pencari kerja yang telah ditempatkan dengan target 60%, indikator ketiga Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama dengan target 22 %, indikator keempat Nilai Sakip dengan target A, Nilai RB dengan target 34. Indikator IPP dengan target 4,1. Indikator SKM dengan target 86,7 (A) sehingga diperlukan perencanaan, evaluasi kinerja sampai realisasi kinerja tahun 2022.

Dalam menunjang target kinerja tersebut Dinas Tenaga Kerja sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2022

tanggal 25 Oktober 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengelola anggaran sebesar Rp. **21.552.229.803** yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.21.314.999.703,00 dan belanja modal sebesar Rp.237.230.100,00. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp.6.562.156.409,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.14.752.843.294,00 sedangkan belanja modal digunakan untuk belanja modal Peralatan dan mesin sebesar Rp.115.000.000,00. Untuk Realisasi keuangan Anggaran sebesar 80,95% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 17.445.732.556,00 dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 6 (Enam) program dan 15 (Lima belas) kegiatan dan sampai dengan akhir bulan Desember 2022 terealisasi fisik sebesar 100 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 12 (Dua Belas) indikator Program sebesar 95 % sesuai laporan E- Monev Dinas Tenaga Kerja tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1 Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Tenaga Kerja.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

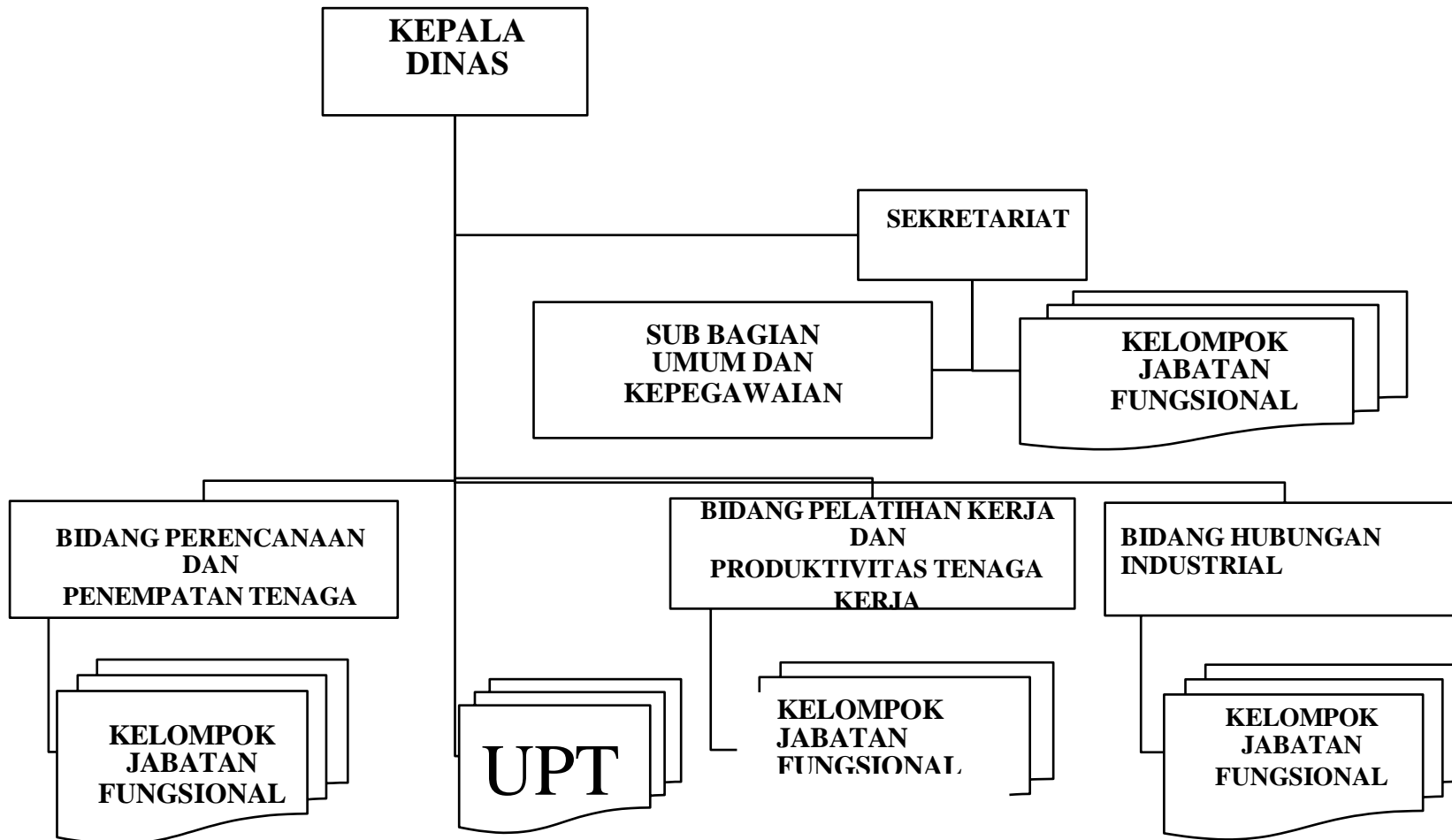
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Dinas Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJONOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO



(Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 33 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional	18
6	Staf Pelaksana	10

2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Tingkat Pengangguran yang masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja b. Rendahnya Produktivitas pekerja terutama setengah penganggur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya Akses Informasi dan pengetahuan mengenai bursa kerja b. Ketidaksesuaian antara kompetensi angkatan kerja dan kualifikasi kebutuhan perusahaan c. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia industri dengan kurikulum pendidikan d. Magang belum terfasilitasi
2	Masih tingginya perselisihan hubungan industrial	Belum optimalnya penindakan terhadap perusahaan yang melanggar	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas Mediator Ketenagakerjaan tidak se banding

		pe-raturan perundang-undangan kete-nagakerjaan	dengan jumlah perusahaan. b. Kurangnya pemahaman Tenaga Kerja dan Perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan
--	--	--	--

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka secara umum, pengangguran muda (20-34 tahun) dan pengangguran terdidik (SMA-SMK) khususnya;
2. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial;
3. Lemahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh;
4. Tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dalam menghadapi persaingan global;
5. Penerapan dan penegakan hukum dalam konflik hubungan industrial belum optimal;
6. Rendahnya pemanfaat perangkat teknologi informasi sebagai sarana pencarian peluang kesempatan kerja;
7. Memunculkan kebutuhan jabatan-jabatan baru yang belum pernah ada sebelumnya karena dinamika revolusi indutri 4.0 dan 5.0;
8. Pengelolaan data dasar ketenagakerjaan yang terpadu;
9. Jumlah dan kualifikasi SDM aparatur fungsional;
10. Sarana prasarana yang belum mengakomodasi kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A *Visi dan Misi*

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi "Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada Kemandirian Lokal berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor jasa dan Industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

B *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran Terserapnya Tenaga Kerja untuk mengatasi pengangguran yang dituju. Sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan : Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan
 - a. Sasaran 1: Meningkatkan angkatan kerja terlatih yang telah bekerja
 - b. Sasaran 2: Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
 - c. Sasaran 3: Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

Dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 seperti yang telah digambarkan dalam matriks diatas, maka sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 70 dan 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dirumuskanlah tujuan, sasaran serta indikator Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang Urusan Tenaga Kerja. Dalam kedudukannya itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo harus dapat berperan sebagai lembaga teknis daerah yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Sidoarjo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, pada urusan perencanaan pembangunan. Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang urusan Tenaga Kerja tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada pengangguran semata. Oleh karena itu urusan tenaga kerja menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pengentasan kemiskinan dengan mendasarkan pada hasil penjangkaran pelatihan dan informasi pasar kerja maupun bursa kerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

C Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor (sesuai sektor kewenangan disnaker)	89,61%
2.	Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja.	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja.	57 %
3	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan.	64%
4	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)	22%

Pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra, pada indikator Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor (sesuai sektor kewenangan disnaker) dengan target 89,61% dengan pertimbangan capaian tahun 2021 adalah 89,13%. Dan target di Renstra tahun 2022 adalah 89,61%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 0,48%.

Pada Indikator Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dengan target 57% dengan pertimbangan capaian tahun 2021 adalah 55,81%. Dan target di Renstra tahun 2022 adalah 57%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 1,19%.

Pada Indikator Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan dengan target 64% dengan pertimbangan capaian tahun 2021 adalah 63,48%. Dan target di Renstra tahun 2022 adalah 64%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 0,52%.

Pada Indikator Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB) dengan target 22% dengan pertimbangan capaian tahun 2021 adalah 18,1%. Dan target di Renstra tahun 2022 adalah 22%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 3,9%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
5	Meningkatnya lapangan kerja baru	Jumlah lapangan kerja baru	24.252 lapangan kerja
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip Nilai RB Nilai IPP Nilai SKM Persentase Penyerapan Anggaran	A 34,48(95%) A Sangat Baik 90%

Pada Indikator Kinerja Tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikoordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

D Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 19.592.716.973 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 21.552.229.803,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rincian anggaran pada tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kiskinan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.074.874.247,-	Rp. 9.469.084.311,-
2.		Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 7.335.422.643,-	Rp. 9.467.466.767,-
3.		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.010.248.083,-	Rp. 1.477.022.353,-
4.			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.751.400.-	Rp. 29.751.400.-
5.			Program	Rp. 60.000.000,-	Rp. 10.700.000,-

			Perencanaan Tenaga Kerja		
6.		Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang konduusif	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.082.420.600	Rp. 1.098.204.972,-
JUMLAH				Rp. 19.592.716.973,-	Rp. 21.552.229.803,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Terciptanya Lapangan Kerja yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja.	121,7%	Sangat baik
		2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	104,6 %	Sangat baik
		3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.	112,5 %	Sangat baik

B Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

1. Sasaran pertama meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 121,7%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja

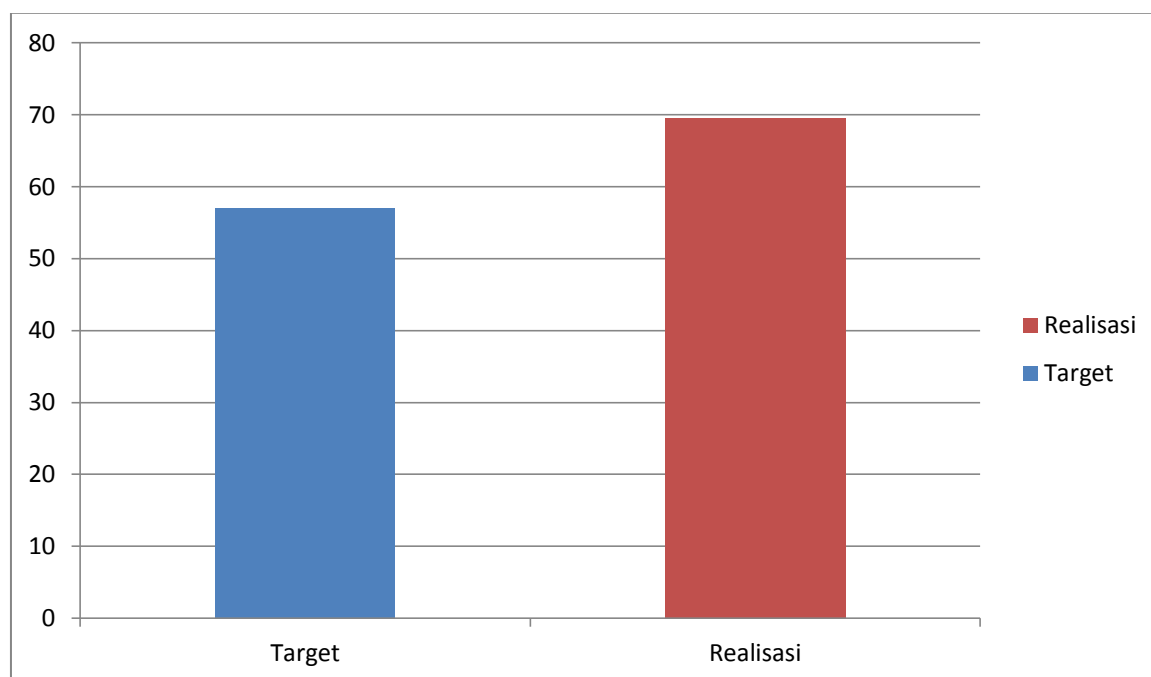
Tabel 3.2

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	57%	69,39%	121,7%

Grafik 3.2.1

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Indikator Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja adalah perhitungan lulusan pelatihan yang telah bekerja setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dapat direalisasikan sebesar 69,39% dengan jumlah peserta lulus pelatihan yang telah bekerja sebesar 705 orang. Bila dibandingkan dengan target sebesar 57%terdapat peningkatan sebesar 12,39% dari target atau setara 87 orang.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja_ Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
2. Sinergitas pemerintah, apindo, akademisi dan BPVP melalui pembentukan skill Development Centre (SDC)

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan mencari peserta pelatihan sesuai juklak dan juknis penyelenggaraan anggaran dari DBHCHT
2. Terbatasnya jumlah SDM Bidang Lattas
3. Kesulitan monitoring peserta pelatihan yang sudah bekerja

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran Meningkatkan angkatan kerja terlatih yang telah bekerja juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, seperti pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan monitoring lulusan pelatihan dengan baik. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022

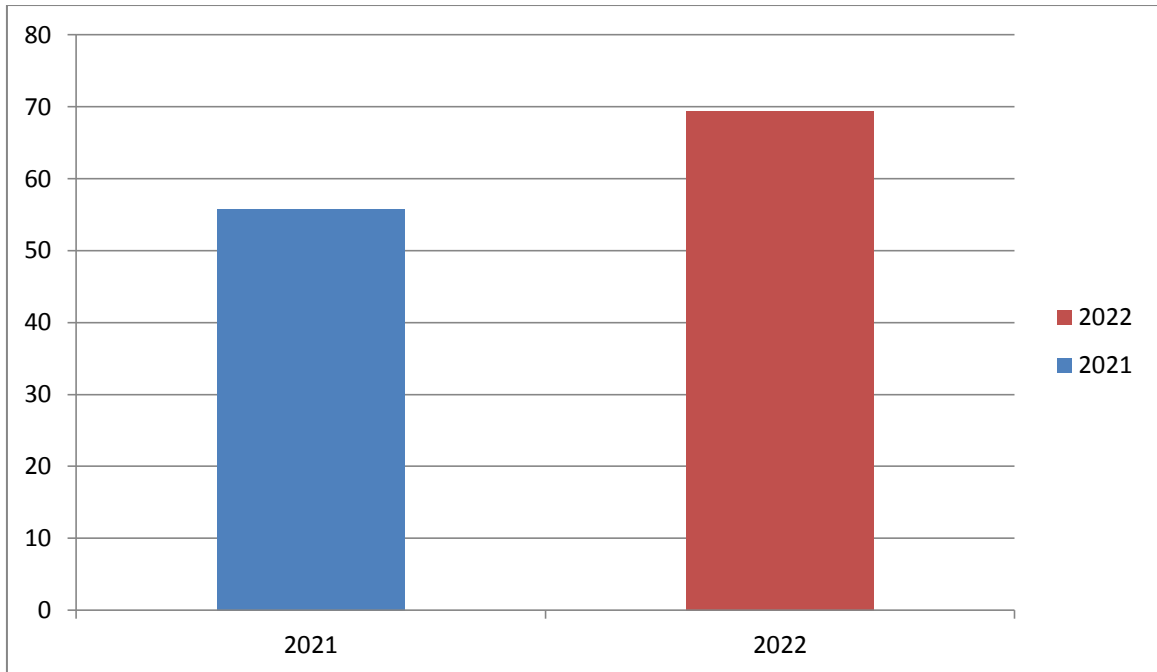
Tabel 3.3

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja Tahun 2021-2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	55,81%	69,39%

Grafik 3.2.2

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja Tahun 2021-2022



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau akhir periode renstra Tahun 2026, maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

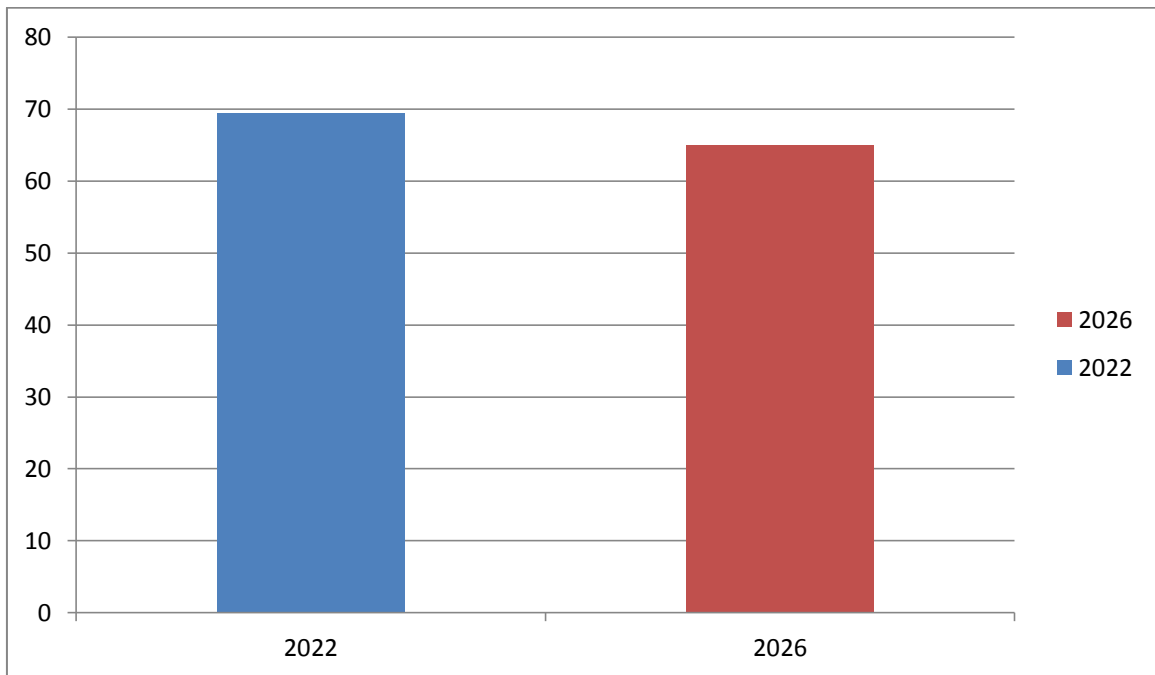
Tabel 3.4

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja terhadap target target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	65%	69,39%	106,7%

Grafik 3.2.3

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang bekerja terhadap target akhir Renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang bekerja adalah sebesar Rp. 9.467.466.767 dengan realisasi sebesar Rp. 5.983.106.540. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran meningkat angkatan kerja terlatih yang telah bekerja. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja.

Tabel 3.5
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perijinan	43 %	43 %	Rp. 9.467.466.767	Rp. 5.983.106.540
		Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	20 %	20 %		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	82 %	78,31 %		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan	82 %	82 %	Rp. 8.711.756.087	Rp. 5.357.941.540

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan berdasarkan unit kompetensi /rasionalisasi anggaran APBD dan Penambahan anggaran DBHCHT	1208 orang	1016 orang	Rp. 8.711.756.087	Rp. 5.357.941.540
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase peserta pembinaan lembaga pelatihan kerja yang memahami materi pembinaan	80 %	80 %	Rp. 19.050.680	Rp. 16.995.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rasionalisasi Anggaran	50 orang/ lembaga	50 orang/ lembaga	Rp. 19.050.680	Rp. 16.995.000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Persentase peserta yang memahami	51 %	0	Rp. 736.660.000	Rp. 608.170.000

	Kabupaten/Kota	bimtek produktivitas				
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasionalisasi Anggaran	1192 orang	1000 %	Rp. 736.660.000	Rp. 608.170.000

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja, berikut alternatif solusi rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja

1. Adanya turunan aturan terkait Anggaran dari DBHCHT
2. Menambah kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja sasaran
3. Sinergitas antara asesor dengan instruktur pelatihan
4. Kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha terkait jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja

2. Sasaran kedua meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Dalam sasaran ini untuk tahun 2022 nilai capaian kinerja sebesar 104,6%. Berikut perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

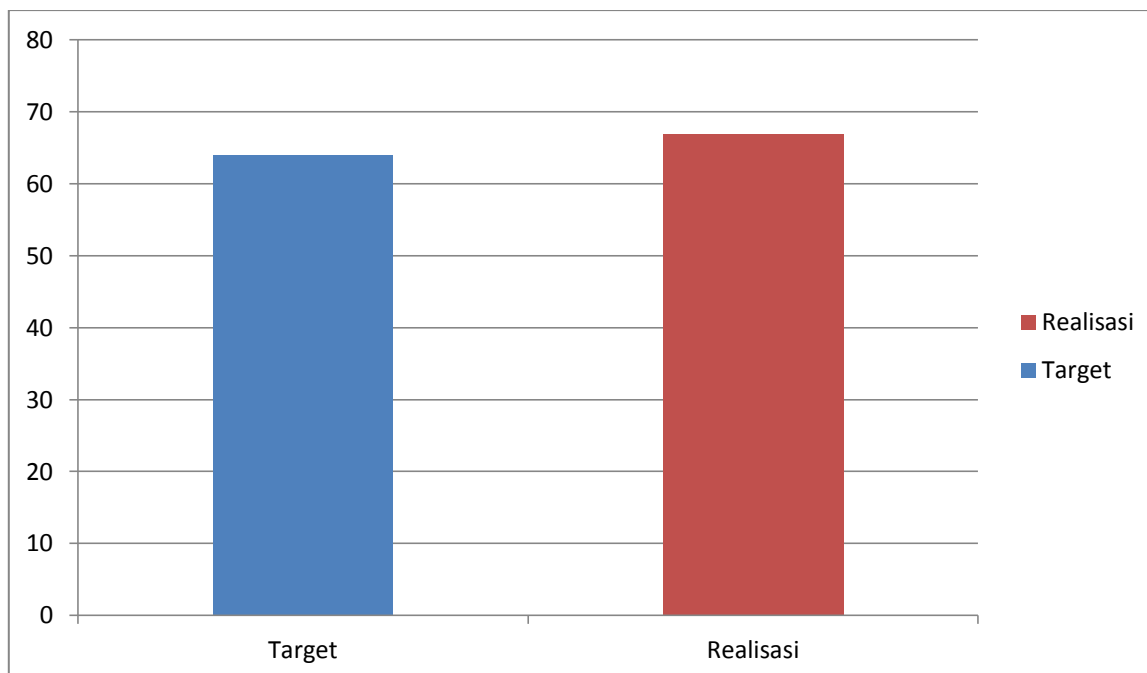
Tabel 3.6

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	64%	66,93%	104,6%

Grafik 3.2.4

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran tersebut diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Indikator Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan adalah perhitungan pencari kerja yang telah ditempatkan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, indikator persentase pencari kerja yang telah ditempatkan dapat direalisasi sebesar 69,39% dengan jumlah pencari kerja 46.099 pencari kerja. Bila dibandingkan dengan target sebesar 64% terdapat peningkatan sebesar 2,93% dari target atau setara 1.350 pencari kerja.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

1. Optimalisasi fungsi perantaraan kerja dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbinganjabatan, job matching, job fair, konsultasi karir untuk mengetahui minat dan bakat disesuaikan dengan lowongan yang ada
2. Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
3. Mendorong pencari kerja yang telah dilatih untuk berwirausaha

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat gap kompetensi antara pencari kerja/tenaga kerja dengan dunia industri dan usaha
2. Minimnya informasi lapangan kerja
3. Kurangnya intervensi kegiatan untuk tenaga kerja lulusan SMA

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik seperti BKK, job matching dan job fair, dan kegiatan yang mendukung program prioritas Bupati terpilih yaitu 100.000 lapangan kerja. Selain itu telah memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk mendukung penempatan tenaga kerja baik secara anggaran maupun non anggaran dengan maksimal. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022

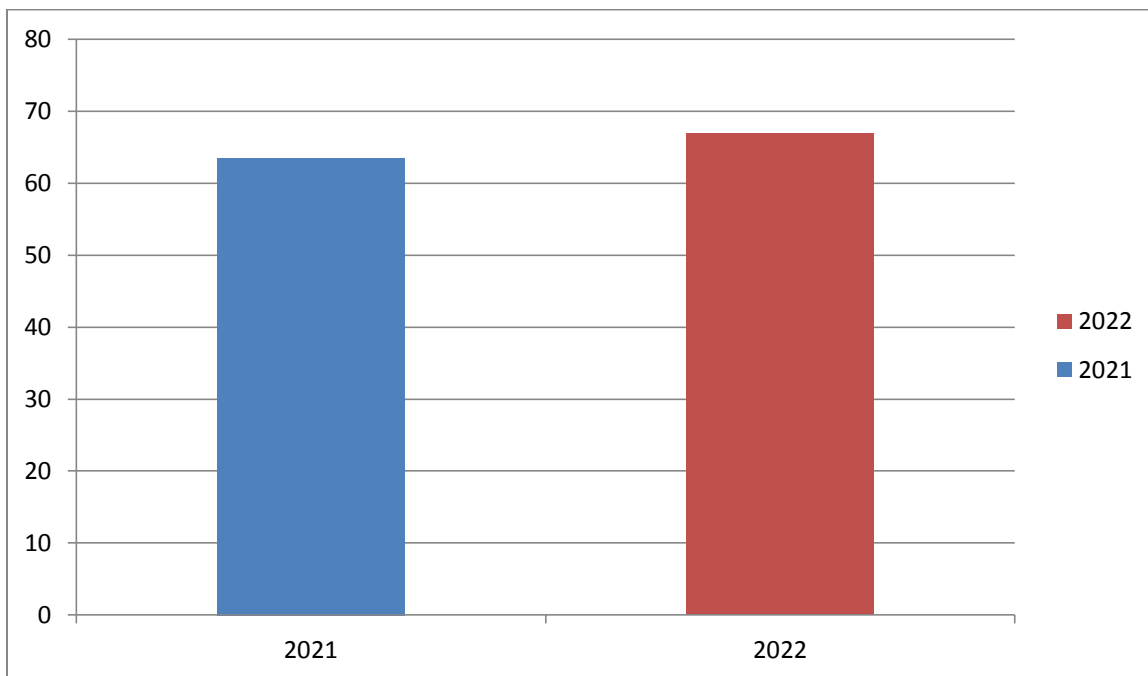
Tabel 3.7

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase Pencari kerja yang telah ditempatkan	63,48%	66,93%

Grafik 3.2.5

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Tahun 2021-2022



Selain itu dibandingkan dengan target jangka menengah, maka capaian pada tahun 2022 ini mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode renstra pada tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

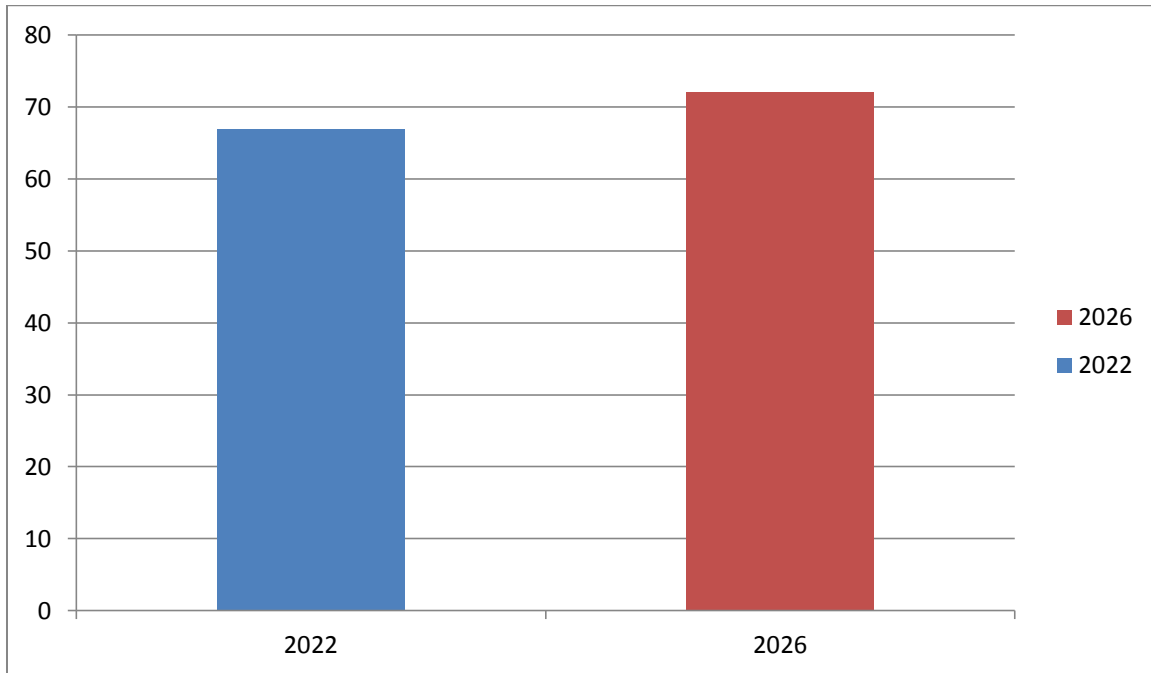
Tabel 3.8

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Presentase Kemajuan
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	72%	66,93%	92,96%

Grafik 3.2.6

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap target akhir Renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah Rp. 1.517.473.753,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.413.587.400. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/kegiatan

No	Program	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK yang tersusun	100%	100%	10.700.000	9.215.000

		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK	100%	100%		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya	64%	64%	1.477.022.353	1.389.772.400
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100%	49%	29.751.400	14.600.000
Total					1.517.473.753	1.413.587.400

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja:

1. Menambah kegiatan yang meningkatkan kapasitas pencari kerja melalui kegiatan Job Matching, BKK, Job Fair dan PBJ
2. Memaksimalkan pelayanan ketenagakerjaan
3. Menyediakan fasilitas pendampingan dalam bentuk sosialisasi/bimtek yg bekerjasama dengan Lembaga terkait
4. Memperluas jaringan informasi pasar kerja

2. Sasaran ketiga meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

Dalam sasaran ini untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 112,5%. Berikut perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

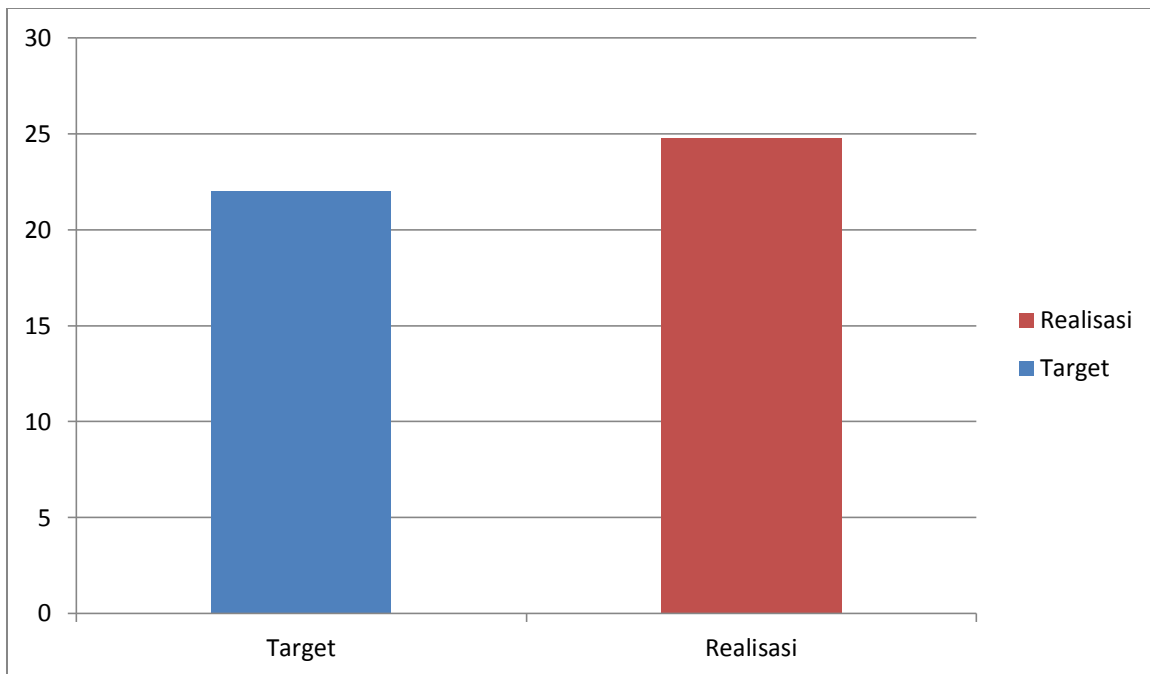
Tabel 3.10

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	22%	24,75%	112,5%

Grafik 3.2.7

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran tersebut diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) adalah perhitungan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) setiap tahunnya. Berdasarkan table 3.10 diatas, indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dapat direalisasi sebesar 24,75% dengan jumlah perselisihan sebanyak 101 kasus. Bila dibandingkan dengan target

sebesar 22% terdapat peningkatan sebesar 2,75% dari target atau setara dengan 3 kasus.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

1. Fasilitasi secara maksimal dalam sidang mediasi sehingga pendirian para pihak dapat dipertemukan melalui kesepakatan
2. Memperjelas kehadiran pihak-pihak yang bersengketa, agar proses mediasi fokus pada penyelesaian perkara

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan Pihak yang bersengketa bukan pengambil keputusan
2. Masih rendahnya sadar ketentuan ketenagakerjaan oleh subyek hubungan industrial
3. Masih banyaknya pelanggaran pemberian hak normatif pekerja
4. Terbatasnya kegiatan pembinaan terkait sarana hubungan industrial

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan seperti sosialisasi, pendampingan dan monitoring kinerja hubungan industrial dengan baik. Pelayanan terhadap yang memiliki perselisihan telah dilakukan mediasi oleh mediator dengan pihak terkait. Pelayanan mediasi sebagai tempat konsultasi juga telah dilakukan dengan maksimal. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022

Tabel 3.11

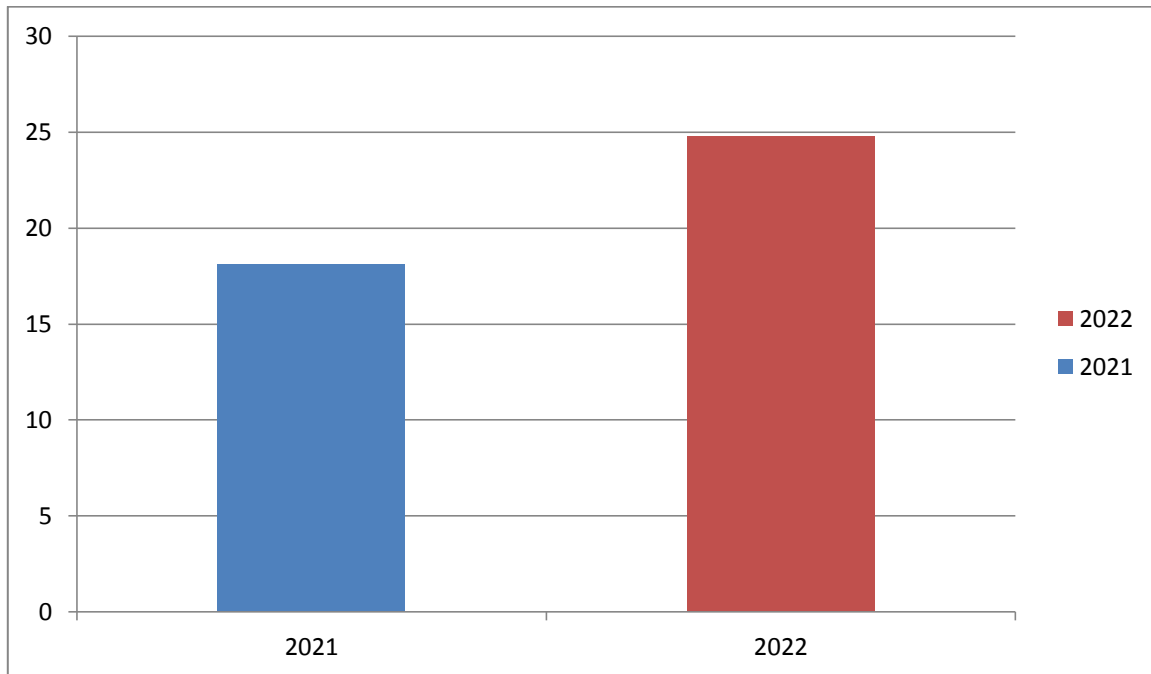
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	
			2021	2022

1	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Pesentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	18,1%	24,75%
---	--	--	-------	--------

Grafik 3.2.8

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif Tahun 2021-2022



Selain itu, jika dibandingkan dengan target menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atauakhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

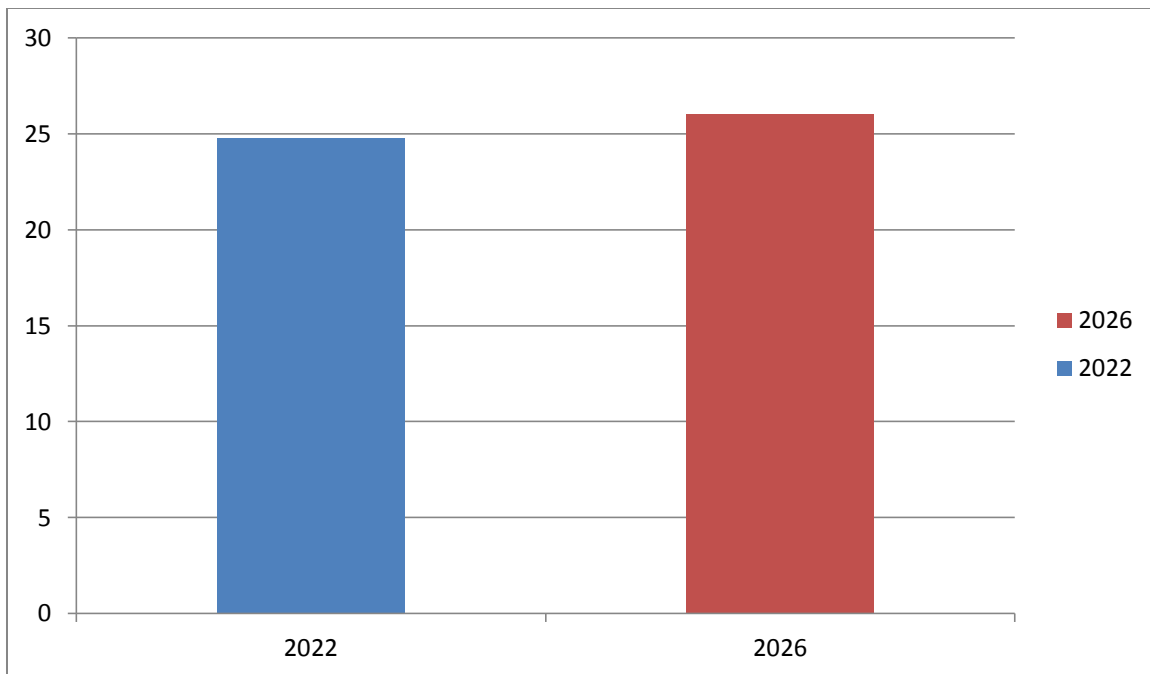
Tabel 3.12

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif Terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Pesentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	26%	24,75%	95,2%

Grafik 3.2.9

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif Terhadap target akhir Renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif adalah sebesar Rp. 1.098.204.972 dengan realisasi sebesar Rp. 1.076.273.050. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.

Tabel 3.13

Realisasi Kinerja dan Anggaran program/kegiatan

No	Program	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui PB oleh mediator HI	22	24,75%	1.098.204.972	1.076.273.050
		Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	25%	33,95%		

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif, berikut alternatif solusi rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Membentuk Forum Komunikasi Jejaring Ketenagakerjaan
2. Membentuk Forum Komunikasi dan Temu Persepsi untuk menjaga kondusifitas hubungan Industrial
3. Pihak yang berselisih di tingkat mediasi diharuskan untuk diberi kuasa penuh dalam pengambil keputusan.
4. Memperketat proses pemanggilan mediasi agar tepat waktu sesuai ketentuan

C Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.13
Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	88 %	100	Rp. 9.469.084.311	Rp. 8.966.196.658	94,76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Jumlah Tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		Rp. 23.464.000	Rp. 23.456.200	99,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen		Rp. 12.720.000	Rp. 12.718.200	99,98
	Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		Rp. 10.744.000	Rp. 10.738.000	99,94

	Perangkat Daerah	Monev PD yang tersusun						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realiasi anggaran PD	90 %	90%		Rp. 6.276.076.409	Rp. 6.074.218.507	96,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		Rp. 6.275.284.409	Rp. 6.073.428.607	96,78
	Koordinasi 96 dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun	14 Laporan	14 Laporan		Rp. 792.000	Rp. 789.900	99,73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya adaministrasi umum perangkat daerah	90 %	90 %		Rp. 1.101.769.602	Rp. 970.152.900	88,05
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan yang tersedia	687 buah	687 buah		Rp. 34.879.326	Rp. 34.864.800	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan	1742 buah	1742 buah		Rp. 83.296.597	Rp. 83.064.500	99,72

	Kantor	kantor yang tersedia						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	29.580 liter	29.585 liter		Rp. 295.800.000	Rp. 225.850.000	76,35
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak penggandaan yang tersedia	84376 Buah	78050 buah		Rp. 39.631.900	Rp. 30.931.300	78,05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	7 jenis	7 jenis		Rp. 10.023.600	Rp. 9.565.000	95,42
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	2400 kotak	1815 kotak		Rp. 77.790.000	Rp. 50.000.000	64,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 %	95,63 %		Rp. 560.348.179	Rp. 535.877.300	95,63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berhasil diadakan tepat waktu	100 %	100 %		Rp. 79.723.900	Rp. 78.857.200	98,13
	Pengadaan Peralatan	Jumlah peralatan	2 unit	2 unit		Rp. 21.193.600	Rp. 20.857.200	98,41

	dan Mesin Lainnya	dan perlengkapan gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang diadakan						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 set	10 set		Rp. 58.530.300	Rp. 58.000.000	99,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %		Rp. 1.588.500.400	Rp. 1.507.584.639	94,90
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	4000 surat	4000 surat		Rp. 13 000.000	Rp. 12.081.975	92,94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan		Rp. 180.000.000	Rp. 129.245.676	71,80
	Penyediaan Jasa	Jumlah pengelola	26 orang	26 orang		Rp. 1.395.500.400	Rp. 1.366.256.988	97,90

Pelayanan Umum Kantor	keuangan dan barang yang terbayar							
	Jumlah tenaga keamanan yang terbayar	6 orang	6 orang					
	Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar	4 orang	4 orang					
	Jumlah tenaga non asn yang terbayar	7 orang	7 orang					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	88 %	88 %			Rp. 399.550.000	Rp. 318.496.120	79,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit			Rp. 20.000.000	Rp. 3.640.900	18,20

	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	50 Buah 21 unit R4 dan R2 21 Kendaraan	50 buah 17 unit R4 dan R2 17 kendaraan		Rp. 135.000.000	Rp. 86.501.500	64,08
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dipelihara	20 unit	20 unit		Rp. 20.000.000	Rp. 19.602.500	98,01
	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatan	50 unit	50 unit		Rp. 109.550.000	Rp. 95.295.300	86,98

	dan Mesin Lainnya	dan mesin lainnya yang diperlihara						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1464 m2	1464 m2		Rp. 115.000.000	Rp. 113.455.920	98,66
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	100 %		Rp. 10.700.000	Rp. 9.215.000	86,12
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen		Rp. 10.700.000	Rp. 9.215.000	86,12
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		Rp. 10.700.000	Rp. 9.215.000	86,12
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perijinan	43 %	43 %		Rp. 9.467.466.767	Rp. 5.983.106.540	63,20

		Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	20 %	20 %				
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	82 %	78,31 %				
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan	82 %	82 %		Rp. 8.711.756.087	Rp. 5.357.941.540	61,50
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan berdasarkan unit kompetensi /rasionalisasi anggaran APBD dan	1208 orang	1016 orang		Rp. 8.711.756.087	Rp. 5.357.941.540	61,50

		Penambahan anggaran DBHCHT						
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase peserta pembinaan lembaga pelatihan kerja yang memahami materi pembinaan	80 %	80 %		Rp. 19.050.680	Rp. 16.995.000	89,21
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rasionalisasi Anggaran	50 orang/lembaga	50 orang/lembaga		Rp. 19.050.680	Rp. 16.995.000	89,21
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami bimtek produktivitas	51 %	0		Rp. 736.660.000	Rp. 608.170.000	82,56
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasionalisasi Anggaran	1192 orang	1000 %		Rp. 736.660.000	Rp. 608.170.000	82,56
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	Persentase peserta yang memahami	81 %	81 %		Rp. 1.477.022.353	Rp. 1.389.772.400	94,10

	KERJA	materi bimtek antar kerja						
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami materi bimtek antar kerja	81 %	81 %		Rp. 1.477.022.353	Rp. 1.389.772.400	94,10
	Perluasan Kesempatan Kerja	Rasionalisasi	72 orang	72 orang		Rp. 64.700.000	Rp. 64.700.000	100
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui job fair	600 orang	624 orang		Rp. 1.398.041.903	Rp. 1.311.194.400	93,79
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti job Fair	40 perusahaan	40 perusahaan		Rp. 1.398.041.903	Rp. 1.311.194.400	93,79
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami sosialisasi PMI	80 %	80 %		Rp. 14.280.450	Rp. 13.878.000	97,20
	Peningkatan Pelindungan dan	Jumlah PMI yang mendapatkan	30 orang	30 orang		Rp. 14.280.450	Rp. 13.878.000	97,20

	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sosialisasi						
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<p>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator HI</p> <p>Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit</p> <p>Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas</p>	<p>22 %</p> <p>25 %</p> <p>37,5 %</p>	<p>24,75 %</p> <p>33,95 %</p> <p>37, 29 %</p>		Rp. 1.098.204.972	Rp. 1.076.273.050	98

		Kesejahteraan Pekerja						
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persyaratan kerja yang disahkan Persentase peserta yang memahami materi persyaratan kerja	100 % 76 %	100 % 76 %		Rp. 375.831.212	Rp. 371.883.950	98,95
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerjasama (MOU) Jumlah peserta bimbingan teknis penyerahan sebagian pekerjaan/perusaha an alih daya	250 perusahaan 30 orang	273 perusahaan 30 orang		Rp. 17.009.870	Rp. 17.007.800	99,98

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Lembaga kerjasama bipartite Jumlah peserta bimbingan teknis / sosialisasi	118 orang 30 orang	142 orang 30 orang		Rp. 358.821.342	Rp. 354.876.150	98,90
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diproses Persentase peserta bimbingan teknis/sosialisasi yang memahami materi	100 % 76 %	100 % 76 %		Rp. 722.373.760	Rp. 704.389.100	97,51
	Pencegahan Perselisihan Hubungan	Jumlah Peserta bimbingan	30 orang	30 orang		Rp. 17.009.870	Rp. 17.007.800	99,98

	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	teknis/sosialisasi Persentase kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang ditangani	100 %	100 %				
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek/Sosialisasi PHI Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terlayani	30 orang 100 %	30 orang 100 %		Rp. 317.337.500	Rp. 308.375.000	97,18
	Pelaksanaan	Jumlah unsur-unsur	3 unsur	3 unsur		Rp. 293.937.500	Rp. 291.325.000	99,11

	Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	yang ada di LKS Tripartit Kabupaten						
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah peserta bimbingan teknis dan kegiatan temu persepsi bagi tim kelembagaan Persentase organisasi pengusaha, SP/SB yang dicatatkan	110 orang 100 %	110 orang 100 %		Rp. 33.819.870	Rp. 31.317.800	92,60
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta bimbingan teknis struktur skala upah Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan sosial	50 orang 30 orang	50 orang 30 orang		Rp. 60.269.020	Rp. 56.363.500	93,52

		tenaga kerja						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					Rp. 29.751.400	Rp. 14.600.000	49,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					Rp. 29.751.400	Rp. 14.600.000	49,07
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	49 %		Rp. 29.751.400	Rp. 14.600.000	49,07
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigrasi yang di fasilitasi penempatannya	2 KK	0 KK		Rp. 29.751.400	Rp. 14.600.000	49,07
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu)	Jumlah Transmigrasi yang di fasilitasi penempatannya	2 KK	0 KK		Rp. 29.751.400	Rp. 14.600.000	49,07

	Daerah Kabupaten/Kota							
Total						Rp. 21.552.229.803	Rp. 17.445.732.556	80,95

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	121,7%	63,2%	36,8%
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan	104,6%	93,15%	6,85%
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	112,5%	98%	2%

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

A. INDIKATOR SASARAN : Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indikator persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja dapat disampaikan bahwa indicator kinerja telah tercapai 121,7%, dan penyerapan anggaran sebesar 63,2% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 58,5%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain pemberian honorarium narasumber pelatihan dan alat bantu pelatihan diberikan sesuai kebutuhan penggunaan

- B. INDIKATOR SASARAN : Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan, berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 104,6% dan penyerapan anggaran sebesar 93,15% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 11,45%. Efisiensi tersebut disebabkan karena program pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena lokasi daerah tujuan UPT Saluandeang Kab. Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Sidoarjo, belum diterbitkannya STP (siap Terima Penempatan) dari Gubernur Sulbar bahwa lokasi penempatan tersebut siap layak dan 2c (clean and clear) sehingga 2 KK tidak berangkat
- C. INDIKATOR SASARAN : Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB), berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 112,5% dan penyerapan anggaran 98% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 14,5%. Efisiensi tersebut dikarenakan sesuai standart harga yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

A *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu Sasaran meningkatnya angkatan kerja terlatih yang bekerja dengan target 57% dan untuk realisasinya di tahun 2022 sebesar 69,39% dengan capaian kinerja 121,7% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal. Sasaran Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja pada tahun 2022 targetnya 64% dengan realisasi 66,93% sehingga capaian kinerjanya 104,6% dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal. Dan sasaran yang terakhir yaitu Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dengan target ditahun 2022 sebesar 22% dan realisasi kinerja ditahun 2022 adalah 24,75% sehingga didapat capaian kinerja sebesar 112,5% dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal

B *Rencana Tindaklanjut*

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja sebesar 121,7%, sedang untuk indikator kinerja sasaran Persentase pencari kerja yang telah ditempatkan sebesar 104,6% dan indikator kinerja sasaran Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebesar 112,5%. Dari ketiga pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan kategori sangat berhasil.

Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo masih membutuhkan upaya-upaya Untuk mengatasi kendala yang ada sehingga dapat di tahun berikutnya sehingga pencapaian sasaran OPD dapat optimal. Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Peningkatan peran dari pejabat fungsional.
2. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja secara memadai.
4. Peningkatan kerja sama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait.
5. Pembentukan tim dalam rangka penyelesaian tugas terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan.
6. Peningkatan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>
2. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Administrator (eselon III)
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

Dokumen ambil di SKP (Screenshoot)
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dokumentasi Penghargaan yang diterima
<https://bit.ly/LAMPIRANLAKIP2022DISNAKER>